KEADILAN GENDER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: STUDI TERHADAP RELASI SUAMI ISTRI

Wesiah

(Madrasah Ibtidaiyah ar-Raudlah imel: wesiahhammad@gmail.com)

Submitted:	Reviewed:	Accepted:
------------	-----------	-----------

Article Info

Abstract

Kata Kunci:

keadilan gender, hukum keluarga Islam, relasi suami istri, fiqh, kesetaraan.

DOI:

This study aims to examine the concept of gender justice in Islamic family law with a focus on the relationship between husband and wife. The methodology employed is a qualitative approach through library research, utilizing hermeneutic analysis of primary sources such as the Qur'an, Hadith, as well as classical and contemporary fiqh literature. The study begins with a normative and sociological understanding of gender justice in Islam, then explores the concept of qiwamah as the husband's leadership principle and the wife's domestic role, as interpreted in both classical and modern exegesis. This research also discusses the rights and obligations of spouses according to Islamic law and how these relationships are understood within classical fiqh, including the resulting gender implications. Furthermore, classical jurists' perspectives on the roles and positions of husbands and wives are analyzed to understand the foundations of gender role disparities in the family. The findings indicate that although classical fiqh tends to position the husband as dominant and the wife in a supportive domestic role, modern interpretations emphasize equality and partnership. The study concludes that it is essential to contextualize Islamic family law with the principle of gender justice in order to establish a harmonious and equitable marital relationship aligned with Islamic values.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep keadilan gender dalam hukum keluarga Islam dengan fokus pada relasi suami istri. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka (library research) dengan analisis hermeneutik terhadap sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, serta literatur fiqh klasik dan modern. Kajian dimulai dari pemahaman normatif dan sosiologis

tentang keadilan gender dalam Islam, kemudian mengeksplorasi konsep *qiwamah* sebagai prinsip kepemimpinan suami dan peran domestik istri dalam tafsir klasik dan modern. Penelitian ini juga membahas hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam dan bagaimana relasi tersebut dipahami dalam fiqh klasik beserta konsekuensi gender yang muncul. Selain itu, pandangan ulama fiqh klasik tentang posisi dan peran suami-istri dianalisis untuk memahami dasar-dasar ketimpangan peran gender dalam keluarga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun fiqh klasik menempatkan suami pada posisi dominan dan istri sebagai pendukung domestik, tafsir modern cenderung menekankan kesetaraan dan kemitraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penting untuk mengontekstualisasikan hukum keluarga Islam dengan prinsip keadilan gender agar tercipta relasi suami istri yang harmonis dan adil sesuai nilai-nilai Islam.

A. PENDAHULUAN

Isu keadilan gender dalam hukum keluarga Islam merupakan topik yang terus relevan dan aktual dalam wacana keislaman dan hukum kontemporer. Di tengah perkembangan pemikiran Islam dan perubahan struktur sosial masyarakat Muslim, relasi antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam institusi keluarga, menjadi subjek yang banyak dikaji ulang. Hukum keluarga Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama klasik memuat aturan-aturan yang mengatur pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, serta tanggung jawab terhadap anak. Namun, dalam praktiknya, interpretasi atas hukum-hukum tersebut kerap kali menimbulkan ketimpangan relasi gender dalam rumah tangga. Hal ini melahirkan pertanyaan besar: sejauh mana hukum keluarga Islam dapat menjamin keadilan gender antara suami dan istri?

Keadilan gender dalam Islam tidak berarti persamaan mutlak antara laki-laki dan perempuan, melainkan pemberian hak dan kewajiban yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan martabat masing-masing tanpa adanya diskriminasi atau dominasi sepihak.¹ Dalam banyak teks klasik, ditemukan konstruksi peran yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Misalnya, laki-laki diberi tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga dan pencari nafkah, sedangkan perempuan ditempatkan sebagai pengelola rumah tangga dan pengasuh anak. Meskipun pembagian peran ini

¹ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Kata Kita, 2004), 37

didasarkan pada dalil-dalil normatif, tetapi dalam konteks masyarakat modern yang semakin egaliter, pemahaman semacam ini perlu ditinjau ulang agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar pembagian peran dalam keluarga adalah QS. An-Nisā' ayat 34: "Ar-rijālu qawwāmūna 'ala an-nisā'..." yang berarti "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan..."² Ayat ini kerap ditafsirkan sebagai legitimasi kepemimpinan mutlak laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga. Namun, para mufassir kontemporer seperti Muhammad Abduh, Amina Wadud, dan Fazlur Rahman telah mencoba menawarkan pendekatan hermeneutis yang lebih kontekstual terhadap ayat tersebut. Menurut mereka, kata qawwam tidak lantas menunjukkan superioritas laki-laki, melainkan tanggung jawab ekonomi dan sosial yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang.³

Di sisi lain, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa relasi suami istri dalam Islam dibangun atas dasar musyawarah, saling menghormati, dan berbagi peran. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku."⁴ Hadis ini menunjukkan bahwa keteladanan Rasulullah dalam memperlakukan istrinya adalah bentuk ideal dari relasi yang setara dan adil. Rasulullah sendiri membantu pekerjaan rumah tangga, berdialog dengan istri-istrinya, dan tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap mereka. Praktik ini menjadi cerminan bahwa keadilan gender dalam rumah tangga bukan hanya ideal, tetapi juga merupakan bagian dari sunnah yang patut diteladani.

Permasalahan muncul ketika tafsir dan fiqh klasik yang lahir dalam konteks masyarakat patriarkal digunakan secara mutlak di era modern. Dalam beberapa kitab fiqh, ditemukan pendapat yang mengharuskan istri untuk patuh total kepada suami, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan aktivitas sosial atau pekerjaan di luar rumah. Misalnya, Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menyatakan bahwa ketaatan istri merupakan salah satu syarat utama keberlangsungan rumah tangga yang harmonis, dan bentuk ketidaktaatan bisa menjadi alasan bagi suami untuk memberikan "teguran" atau hukuman.⁵ Pandangan seperti ini, bila diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan perkembangan zaman dan nilai-nilai hak asasi manusia, berpotensi mengakibatkan ketimpangan struktural yang mengakar dalam keluarga Muslim.

Di Indonesia, wacana keadilan gender dalam hukum keluarga juga mendapat perhatian serius, terutama dalam konteks pembaruan hukum Islam.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), 34

³ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 69-71

⁴ HR. Tirmidzi, no. 3895.

⁵ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun), 52.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku sejak 1991 telah memberikan sejumlah kemajuan dalam upaya menciptakan relasi yang lebih adil antara suami istri. Pasal-pasal dalam KHI menekankan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri, serta membuka ruang dialog antara norma agama dan hukum positif.⁶ Namun demikian, masih banyak praktik di lapangan yang tidak sesuai dengan semangat keadilan ini, terutama dalam kasus-kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan pembatasan peran perempuan dalam keluarga.

Melalui artikel ini, penulis akan menganalisis secara lebih dalam konsep keadilan gender dalam hukum keluarga Islam dengan fokus pada relasi suami istri. Kajian ini akan menelaah secara kritis dalil-dalil normatif, tafsir klasik dan kontemporer, serta implementasi hukum keluarga di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menggali potensi keadilan yang terkandung dalam teks-teks Islam, sekaligus mendorong pembaruan hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan lahir suatu pemahaman yang lebih inklusif, humanis, dan adil dalam memaknai relasi suami istri dalam kerangka hukum keluarga Islam.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan melalui telaah literatur dari berbagai sumber primer dan sekunder, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh klasik, serta kajian akademik dan artikel ilmiah terkait hukum keluarga Islam dan isu gender. Analisis dilakukan dengan pendekatan hermeneutik untuk memahami makna teks-teks agama dalam konteks relasi suami istri secara mendalam dan kontekstual.⁷

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif dengan meninjau pandangan ulama klasik dan modern mengenai keadilan gender, serta interpretasi hukum keluarga yang berkembang. Dengan demikian, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang holistik dan kritis mengenai penerapan prinsip keadilan gender dalam hubungan suami istri menurut perspektif hukum Islam.⁸

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Keadilan Gender dalam Islam

a. Pengertian Keadilan Gender: Definisi Normatif dan Sosiologis

Keadilan gender merupakan konsep yang berkembang dalam wacana hak asasi manusia, keagamaan, dan sosiologi, yang bertujuan untuk menghapus ketimpangan dan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Dalam konteks umum, keadilan gender mengacu pada kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991

⁷ Creswell, John W., *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Sage Publications, 2013), 45

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 10-12.

hak, tanggung jawab, dan peluang dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, hukum, dan budaya.⁹

Secara normatif, keadilan gender didefinisikan sebagai pemberian perlakuan yang adil dan setara kepada semua individu, tanpa memandang jenis kelaminnya, dalam hal kesempatan, perlindungan hukum, dan pengakuan martabat manusia. Konsep ini bukan sekadar menuntut kesamaan (equality), tetapi lebih pada pemenuhan hak dan tanggung jawab secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing pihak. Dalam pandangan ini, keadilan bukan berarti harus identik, tetapi harus adil secara substantif dan kontekstual.¹⁰ Misalnya, keadilan tidak harus memaksakan perempuan untuk melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki jika memang terdapat perbedaan biologis atau psikologis yang signifikan. Namun, keadilan gender menuntut agar perbedaan tersebut tidak menjadi alasan untuk mendiskriminasi atau membatasi partisipasi perempuan dalam ruang publik maupun domestik.

Dalam perspektif sosiologis, keadilan gender dilihat sebagai upaya untuk membongkar struktur sosial dan budaya yang selama ini menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Patriarki sebagai sistem sosial yang mengutamakan dominasi laki-laki atas perempuan dianggap sebagai hambatan utama dalam mewujudkan keadilan gender. Sistem ini tercermin dalam pembagian kerja yang timpang, pengambilan keputusan yang bias, serta konstruksi peran gender yang kaku dalam keluarga dan masyarakat.¹¹ Oleh karena itu, keadilan gender dalam pendekatan sosiologis tidak hanya berbicara tentang hukum atau peraturan formal, tetapi juga menyangkut perubahan norma sosial, relasi kuasa, dan kesadaran kolektif.

b. Prinsip Keadilan dalam Islam (*al-'adl*) dan Penerapannya dalam Relasi Laki-laki dan Perempuan

Keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam yang mencerminkan inti dari tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*). Keadilan tidak hanya menjadi prinsip dalam hukum, tetapi juga menjadi fondasi etis dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks relasi gender, pemahaman dan penerapan prinsip keadilan menjadi sangat penting untuk menegakkan harmoni, keseimbangan hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

⁹ UNESCO, *Gender Equality and Equity: A Summary Review of UNESCO's Accomplishments since the Fourth World Conference on Women (Beijing 1995)* (Paris: UNESCO, 2000), 5

¹⁰ Musdah Mulia, *Ensiklopedi Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi* (Jakarta: Kalyanamitra, 2019), 54.

¹¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 11-15.

Secara etimologis, 'adl berasal dari akar kata 'adala yang berarti "seimbang," "lurus," dan "tidak berat sebelah."¹² Dalam Al-Qur'an, kata 'adl digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari keadilan dalam penghakiman, hubungan sosial, hingga dalam beragama. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl: 90). Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan bukan sekadar anjuran, tetapi merupakan perintah ilahi yang mencerminkan sifat Allah sebagai al-'Adl (Yang Maha Adil).¹³

Keadilan dalam Islam tidak bersifat netral atau legalistik semata, melainkan substansial dan kontekstual. Hal ini berarti bahwa dalam menerapkan prinsip keadilan, Islam mempertimbangkan kondisi individu, masyarakat, dan tujuan akhir dari suatu hukum. Dalam kerangka ini, keadilan tidak boleh menimbulkan ketidakadilan baru, termasuk dalam hal relasi antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, setiap bentuk perlakuan yang menyebabkan dominasi, eksploitasi, atau marginalisasi terhadap salah satu jenis kelamin bertentangan dengan semangat 'adl yang diajarkan Islam.

Dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan, Islam memandang keduanya sebagai makhluk yang setara dalam penciptaan, tanggung jawab moral, serta potensi spiritual. Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal..." (QS. Al-Hujurat: 13).¹⁴ Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada hierarki esensial antara laki-laki dan perempuan; perbedaan biologis tidak boleh dijadikan dasar ketimpangan struktural.

Para pemikir Islam kontemporer seperti Fazlur Rahman, Amina Wadud, dan Musdah Mulia menekankan perlunya pemahaman kontekstual dan etis terhadap teks-teks keagamaan, sehingga keadilan yang dimaksud dalam Islam benar-benar tercermin dalam praktik kehidupan. Mereka menyatakan bahwa hukum-hukum Islam harus ditafsirkan berdasarkan prinsip keadilan substantif, bukan keadilan prosedural yang hanya berorientasi pada formalitas teks.¹⁵

c. Perbedaan antara Keadilan (*Justice*) dan Kesamaan (*Equality*) dalam Bingkai Islam

Dalam wacana keislaman kontemporer, pembahasan mengenai keadilan (*justice*) dan kesamaan (*equality*) menjadi penting, terutama dalam konteks relasi gender. Keduanya sering dipahami secara tumpang tindih, padahal secara filosofis dan normatif, kedua konsep ini memiliki

¹² Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab*, Jilid 11 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 431.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*

¹⁵ Musdah Mulia, *Ensiklopedi Muslimah Reformis...*94–95.

makna dan implikasi yang berbeda. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan mengakui pentingnya baik keadilan maupun kesamaan, namun memberikan penekanan yang berbeda dalam penerapannya.

Secara terminologis, justice atau keadilan (al-'adl) dalam Islam bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, dan memperlakukan seseorang berdasarkan kebutuhan, kapasitas, dan kontribusinya secara proporsional.¹⁶ Sementara itu, equality atau kesamaan (musāwah) lebih merujuk pada perlakuan yang identik terhadap semua orang tanpa mempertimbangkan perbedaan individual atau social.¹⁷ Dengan kata lain, kesamaan menekankan pada pemberian perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, sedangkan keadilan menekankan pada pemberian yang sesuai dengan situasi, konteks, dan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam perspektif Islam, keadilan lebih diutamakan ketimbang kesamaan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai prinsip syariat yang menekankan keadilan sebagai nilai utama dalam kehidupan sosial, politik, dan keluarga. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl: 90), yang menunjukkan bahwa keadilan adalah perintah langsung dari Tuhan dan menjadi standar moral dalam hubungan antar manusia.¹⁸ Islam tidak menuntut semua manusia menjadi sama dalam segala hal, karena secara fitrah terdapat perbedaan fisik, biologis, psikologis, dan sosial antara individu satu dengan yang lainnya. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan ketidakadilan.

Contoh konkret dari penerapan keadilan dibandingkan kesamaan dalam Islam dapat ditemukan dalam pembagian warisan. Dalam sistem fara'id, bagian warisan antara laki-laki dan perempuan tidak selalu sama; misalnya, anak laki-laki memperoleh dua bagian dibandingkan anak perempuan satu bagian (QS. An-Nisā': 11). Namun, hal ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan mencerminkan prinsip keadilan dalam tanggung jawab ekonomi dan sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Islam tradisional.¹⁹ Laki-laki, dalam sistem tersebut, bertanggung jawab menafkahi keluarga, sedangkan perempuan secara hukum tidak dibebani hal tersebut.

¹⁶ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*...302.

¹⁷ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam* (New Delhi: Sterling Publishers, 2004), 45.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), 422.

Kesamaan (equality) tetap menjadi bagian dari nilai Islam, terutama dalam aspek spiritual dan moral. Dalam banyak ayat Al-Qur'an, Allah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam ibadah, pahala, dan tanggung jawab moral. Dalam QS. Al-Aḥzāb: 35 disebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang beriman akan memperoleh ganjaran yang sama atas amal perbuatan mereka.²⁰ Ayat ini menegaskan bahwa kesamaan dalam Islam bersifat fungsional dan berbasis pada nilai-nilai ruhani dan amal kebajikan, bukan semata-mata identitas biologis.

2. Dasar-Dasar Hukum Keluarga Islam tentang Relasi Suami Istri

a. Dalil Al-Qur'an dan Hadis tentang Relasi Suami Istri

Relasi antara suami dan istri dalam Islam merupakan bagian penting dari kehidupan keluarga yang menjadi pondasi masyarakat. Al-Qur'an dan Hadis memberikan panduan yang jelas tentang hubungan ini, tidak hanya dalam hal hak dan kewajiban, tetapi juga dalam hal etika, tanggung jawab moral, dan tujuan spiritual dari pernikahan. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar kontrak sosial (*'aqd*), melainkan juga ikatan sakral (*mītsāq ghalīzh*) yang dilandasi oleh cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama.

Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan dalam membahas relasi suami istri adalah QS. An-Nisā': 34:

"*Ar-rijālu qawwāmūna 'alan-nisā'i bimā faḍḍalallāhu ba'dahum 'alā ba'din wa bimā anfaqū min amwālihim...*" ("Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...")²¹

Ayat ini menyebutkan bahwa laki-laki memiliki fungsi *qiwāmah* atas perempuan. Kata *qawwām* secara bahasa berarti pemelihara, pelindung, dan penanggung jawab. Namun, makna ini sering ditafsirkan secara patriarkal sebagai bentuk superioritas laki-laki. Padahal, secara konteks, ayat ini berbicara tentang tanggung jawab laki-laki dalam menafkahi, melindungi, dan menjaga keluarganya, bukan hak untuk mendominasi perempuan.

Menurut para mufasir modern seperti M. Quraish Shihab, kelebihan laki-laki yang disebut dalam ayat tersebut bukanlah dalam hal nilai kemanusiaan, melainkan dalam hal peran sosial yang berdampak pada tanggung jawab finansial dan protektif terhadap keluarga.²² Dalam hal ini, *qiwāmah* tidak boleh dimaknai sebagai otoritas mutlak suami atas istri, melainkan sebagai tanggung jawab fungsional yang harus dijalankan dengan adil dan penuh kasih sayang.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*

²² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an...* 411

Ayat lain yang sangat penting dalam membangun relasi suami istri adalah QS. Ar-Rūm: 21:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah wa rahmah..."*²³

Ayat ini menegaskan bahwa relasi suami istri idealnya dilandasi oleh *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang). Bukan kekuasaan atau dominasi yang menjadi dasar hubungan ini, melainkan ketenangan batin dan kasih yang timbal balik. Cinta dan kasih sayang menjadi prinsip relasional yang harus dijaga dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, kekerasan, pemaksaan, atau pengabaian dalam hubungan suami istri jelas bertentangan dengan nilai-nilai Qur'ani ini.

b. Hadis-Hadis tentang Akhlak Suami kepada Istri

Selain Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW juga memberikan teladan dan nasihat yang sangat menekankan pentingnya memperlakukan istri dengan akhlak mulia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, Rasulullah bersabda:

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku." (HR. al-Tirmidzi)²⁴

Hadis ini menegaskan bahwa tolok ukur kebaikan seseorang diukur dari bagaimana ia memperlakukan pasangannya. Rasulullah SAW sendiri dikenal sebagai sosok yang lembut, penyabar, dan penuh perhatian terhadap istri-istrinya. Ia tidak pernah membentak atau menyakiti mereka, bahkan sering membantu pekerjaan rumah tangga, seperti dalam riwayat Aisyah RA yang menyebutkan bahwa Nabi "menjahit pakaiannya sendiri dan membantu pekerjaan rumah."²⁵

Dalam riwayat lain disebutkan:

"Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya." (HR. Ahmad dan al-Tirmidzi)²⁶

Hadis ini tidak hanya mengaitkan akhlak baik dengan iman, tetapi juga secara khusus menyebut perlakuan terhadap istri sebagai indikator kebaikan sejati seorang Muslim. Dari uraian dalil-dalil di atas, jelas bahwa Islam mengajarkan relasi suami istri yang didasarkan pada tanggung jawab, kasih sayang, dan penghormatan timbal balik. Fungsi suami sebagai *qawwām* tidak boleh dimaknai sebagai otoritas tiranik, tetapi sebagai tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga kesejahteraan keluarganya. Sementara itu, istri tidak diposisikan sebagai subordinat, melainkan sebagai pasangan setara dalam cinta dan pengabdian kepada Allah. Relasi yang sehat antara suami istri dalam

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*

²⁴ HR. al-Tirmidzi, *Kitāb al-Raḍā'*, no. 3895

²⁵ HR. al-Bukhari dalam *Adab al-Mufrad*, No. 538.

²⁶ HR. Ahmad, *Musnad Ahmad*, no. 24677; juga dalam al-Tirmidzi, No. 1162.

Islam adalah relasi yang saling melengkapi dalam bingkai keadilan dan kasih sayang.

3. Konsep *Qiwāmah* (Kepemimpinan Suami) dan Peran Domestik Istri dalam Tafsir Klasik dan Modern

Dalam kerangka hukum keluarga Islam, relasi antara suami dan istri sering dikaitkan dengan konsep *qiwāmah*, yakni kepemimpinan suami atas istri. Konsep ini umumnya merujuk pada ayat dalam Al-Qur'an, QS. An-Nisā': 34:

*“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”*²⁷

Ayat ini menjadi dasar utama dalam menjelaskan struktur kepemimpinan dalam keluarga, yang meletakkan laki-laki sebagai *qawwām*, yaitu pelindung, penanggung jawab, atau pemimpin atas perempuan (dalam hal ini, istri). Namun, makna dan implikasi dari *qiwāmah* mengalami pergeseran pemahaman dari tafsir klasik menuju tafsir kontemporer.

a. *Qiwāmah* dalam Tafsir Klasik

Dalam tafsir klasik, para mufasir seperti al-Ṭabarī dan al-Qurṭubī memaknai *qiwāmah* sebagai bentuk kelebihan laki-laki atas perempuan yang memberikan legitimasi bagi laki-laki untuk memimpin, mengatur, bahkan memberi sanksi kepada perempuan dalam konteks rumah tangga. Al-Ṭabarī menyatakan bahwa *qiwāmah* berarti laki-laki memiliki otoritas atas perempuan karena kelebihan akal, kemampuan, dan tanggung jawab finansial yang diberikan oleh Allah.²⁸ Al-Qurṭubī menambahkan bahwa kepemimpinan ini mencakup pengawasan, pembinaan, bahkan peringatan fisik dalam konteks tertentu apabila istri dianggap melakukan *nusyūz* (pembangkangan).

Tafsir klasik umumnya merefleksikan pandangan sosial dan budaya yang patriarkal di zamannya, yang menempatkan perempuan dalam ruang domestik dan laki-laki dalam ruang publik. Oleh karena itu, peran domestik istri dianggap sebagai bagian dari fitrah dan kewajiban perempuan, sedangkan suami bertanggung jawab atas seluruh urusan luar rumah dan pengambilan keputusan strategis keluarga.

b. Reinterpretasi dalam Tafsir Modern

Berbeda dengan tafsir klasik, para mufasir modern melakukan pembacaan ulang terhadap konsep *qiwāmah* dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kesalingan, dan konteks historis ayat. M. Quraish Shihab, misalnya, menjelaskan bahwa *qiwāmah* bukanlah bentuk superioritas ontologis laki-laki atas perempuan, tetapi tanggung jawab sosial yang lahir dari kondisi kultural dan beban ekonomi yang dipikul

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*

²⁸ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz V (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2001), 60.

laki-laki pada masa itu.²⁹ Menurutnya, kelebihan laki-laki yang dimaksud dalam ayat bersifat kondisional dan dapat berubah sesuai konteks zaman.

Para pemikir Muslim progresif seperti Amina Wadud dan Asma Barlas juga mengkritik tafsir klasik yang memaknai *qiwamah* secara hirarkis. Mereka berargumen bahwa relasi suami istri seharusnya bersifat egaliter, dengan membangun kemitraan yang setara dalam rumah tangga. Dalam pandangan ini, peran domestik tidak lagi dilihat sebagai kewajiban mutlak perempuan, tetapi hasil kesepakatan bersama berdasarkan kemampuan dan situasi masing-masing pasangan.³⁰

Lebih jauh, konsep *qiwamah* juga tidak boleh digunakan sebagai justifikasi untuk kekerasan dalam rumah tangga atau pengabaian terhadap hak-hak perempuan. Islam, menurut pemahaman ini, sangat menekankan pada keadilan (*'adl*) dan kasih sayang (*rahmah*) dalam relasi rumah tangga, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rūm: 21.

C. Peran Domestik Istri: Perspektif Baru

Dalam masyarakat tradisional Islam, peran domestik istri – seperti mengurus rumah, memasak, dan mengasuh anak – dianggap sebagai tanggung jawab utama perempuan. Namun, dalam masyarakat modern, batas antara peran domestik dan publik semakin kabur. Banyak perempuan Muslim kini berperan sebagai pencari nafkah, pengambil keputusan, dan bahkan pemimpin publik, tanpa meninggalkan peran keluarganya.

Islam tidak secara eksplisit mewajibkan perempuan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas-tugas domestik tidak disebut sebagai kewajiban hukum dalam fikih, melainkan lebih kepada tradisi sosial. Oleh karena itu, dalam bingkai kesalingan, pekerjaan domestik dapat dibagi secara adil berdasarkan prinsip musyawarah dan *ridha* bersama. Nabi Muhammad SAW sendiri menjadi teladan dalam hal ini, sebagaimana dalam riwayat Aisyah:

"Rasulullah biasa membantu pekerjaan rumah tangga, dan ketika mendengar azan, beliau segera keluar untuk salat." (HR. Bukhari)³¹

Konsep *qiwamah* tidak boleh dipahami secara statis dan otoriter. Dalam tafsir kontemporer, *qiwamah* lebih dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial, bukan superioritas gender. Demikian pula, peran domestik istri tidak boleh dijadikan dalih untuk mengurung perempuan dalam rumah, melainkan perlu diposisikan sebagai bagian dari kerja sama suami istri dalam membangun

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam

²⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an...* 420.

³⁰ Amina Wadud, *Qur'an and Woman...* 72.

³¹ HR. Bukhari, *Adab al-Mufrad*, no. 538.

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan biologis atau legal formal, tetapi merupakan ikatan spiritual dan sosial yang dibangun atas dasar tanggung jawab, kasih sayang, dan kerja sama. Relasi suami istri dalam hukum Islam diatur secara rinci, mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan adil, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rūm: 21 bahwa Allah menciptakan pasangan manusia agar mereka hidup dalam ketenangan, dengan dasar *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang).³²

a. Hak dan Kewajiban Suami

Dalam hukum Islam, suami memiliki sejumlah kewajiban terhadap istrinya yang menjadi bagian dari tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga (*qawwām*), sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisā': 34.³³

1) Nafkah

Suami wajib memberikan nafkah kepada istri berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya sesuai dengan kemampuan dan kondisi ekonomi suami. Hal ini ditegaskan dalam QS. At-Talāq: 7, "...dan orang yang mempunyai kelapangan hendaklah menafkahkan dari kelapangannya."³⁴

2) Pergaulan yang baik (*mu'āsyrāh bi al-ma'rūf*)

Islam mewajibkan suami memperlakukan istrinya dengan baik, menghargai, dan tidak menyakiti secara fisik maupun psikis. Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya.*" (HR. al-Tirmidzi)³⁵

3) Memberikan perlindungan dan rasa aman

Suami bertanggung jawab menjaga kehormatan dan keamanan istri serta memastikan kesejahteraan rumah tangga secara umum. Hal ini juga mencakup tanggung jawab mendidik istri dan anak-anak dalam kebaikan dan agama.

4) Memberikan hak seksual secara layak

Islam menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan biologis pasangan, termasuk dari pihak suami kepada istri, sebagai bagian dari keharmonisan rumah tangga dan menghindari potensi perselingkuhan atau konflik.

b. Hak dan Kewajiban Istri

Istri dalam hukum Islam juga memiliki kewajiban dan hak yang dijamin oleh syariat. Di antara kewajibannya adalah:

1) Taat kepada suami dalam hal yang *ma'rūf*

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ HR. al-Tirmidzi, *Kitāb al-Raḍā'*, No. 3895.

Ketaatan istri terhadap suami merupakan bagian dari harmoni rumah tangga, selama perintah suami tidak bertentangan dengan syariat. Taat dalam hal ini tidak berarti tunduk secara mutlak, melainkan saling menghormati fungsi masing-masing dalam keluarga.³⁶

2) Menjaga kehormatan diri dan harta suami

Istri wajib menjaga kehormatan dirinya dan rahasia rumah tangga, termasuk tidak menggunakan harta suami tanpa izin. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisā': 34, "...wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada..."³⁷

3) Melayani suami dalam hal hubungan suami istri

Dalam hal ini, Islam menekankan hak dan kewajiban timbal balik, sehingga tidak hanya istri yang berkewajiban, tetapi juga suami. Islam sangat menganjurkan dialog dan kerja sama antara pasangan untuk mencapai kepuasan bersama, bukan pemaksaan.

5. Hak Istri

Istri memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh hukum Islam:

- a. Hak atas mahar (maskawin) sebagai tanda penghormatan dan bentuk tanggung jawab suami, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisā': 4.³⁸
- b. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik, tanpa kekerasan atau pemaksaan.
- c. Hak untuk mendapatkan pendidikan, berkarier, dan mengembangkan potensi diri, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan disepakati bersama dalam keluarga.
- d. Hak untuk meminta cerai (khulu') jika tidak tercapai lagi keharmonisan atau terjadi pelanggaran serius terhadap haknya sebagai istri.

6. Relasi dalam Hak dan Kewajiban

Prinsip dasar dalam relasi suami istri menurut hukum Islam adalah *kesalingan (mubādalah)*. Suami dan istri saling melengkapi, bukan saling mendominasi. Islam mengajarkan bahwa masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab yang proporsional, yang harus dijalankan dengan semangat keadilan dan kasih sayang.

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 187:

"...mereka (istri-istri) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka..."³⁹

Ayat ini menggambarkan kedekatan, perlindungan, dan kebutuhan timbal balik antara suami dan istri. Oleh karena itu, setiap bentuk ketimpangan dalam relasi baik dominasi suami secara absolut maupun

³⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 703

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*,

pengabaian terhadap kewajiban dari istri—bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.

7. Relasi Suami Istri dalam Fiqh Klasik dan Konsekuensi Gendernya

a. Pandangan Ulama Fiqh Klasik tentang Posisi dan Peran Suami-Istri

Fiqh klasik, yang merupakan hasil ijtihad para ulama Muslim pada masa lalu, memberikan fondasi utama bagi pemahaman tradisional tentang posisi dan peran suami-istri dalam rumah tangga Islam. Pemikiran ini terbentuk dalam konteks sosial dan budaya yang patriarkal, sehingga menempatkan suami sebagai kepala keluarga dengan otoritas dominan, sementara istri berperan terutama dalam urusan domestik. Pemahaman ini merujuk pada teks-teks Al-Qur'an dan Hadis serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berkembang melalui madzhab-madzhab fiqh klasik, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

b. Posisi Suami sebagai Kepala Keluarga (*Qiwamah*)

Para ulama fiqh klasik sepakat bahwa suami memiliki posisi sebagai *qawwām* atau kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan istri dan anak-anaknya. Dalam kitab-kitab fikih, seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudamah (Hanbali) dan Al-Hidayah karya al-Marghinani (Hanafi), dinyatakan bahwa suami mempunyai hak kepemimpinan yang meliputi tanggung jawab nafkah, perlindungan, dan pengaturan rumah tangga.⁴⁰

Kepemimpinan ini bukan hanya kewenangan administratif, tetapi juga kewajiban moral untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan keluarga. Ulama memandang suami sebagai sosok yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam mengatur urusan ekonomi dan sosial keluarga.

c. Peran Istri dalam Rumah Tangga

Posisi istri dalam fiqh klasik lebih banyak dikaitkan dengan tugas domestik dan pengelolaan rumah tangga. Istri dianggap bertanggung jawab untuk mengurus rumah, memasak, merawat anak-anak, dan menjaga kehormatan keluarga. Dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah menegaskan bahwa kewajiban istri mencakup taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat.⁴¹

Selain itu, istri wajib menjaga harta dan kehormatan suami, serta tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami kecuali untuk keperluan penting. Ketentuan ini dirumuskan dengan tujuan menjaga stabilitas keluarga dan kehormatan pasangan.

d. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Fiqh Klasik

Menurut madzhab klasik, hak dan kewajiban suami dan istri bersifat jelas dan terstruktur:

⁴⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 123.

⁴¹ *Ibid.*, 130.

- 1) Hak Suami: Termasuk menerima ketaatan dari istri, mendapatkan layanan dalam hal hubungan suami istri, dan hak mengatur rumah tangga.⁴² Suami juga berhak menegakkan disiplin jika istri melakukan nusyūz (pembangkangan).
 - 2) Kewajiban Suami: Menafkahi istri dan keluarganya sesuai kemampuan, serta memberikan perlindungan dan kasih sayang.⁴³
 - 3) Hak Istri: Mendapatkan nafkah yang layak, perlindungan, dan hak-hak lain sesuai pernikahan seperti mahar.⁴⁴
 - 4) Kewajiban Istri: Taat kepada suami dalam perkara yang ma'rūf, mengelola rumah tangga, dan menjaga kehormatan diri serta keluarga.⁴⁵
- e. Pandangan Ulama terhadap Nusyūz dan Disiplin

Salah satu tema penting dalam fiqh klasik adalah penanganan istri yang dianggap nusyūz, yaitu menentang atau membangkang terhadap suami. Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali secara umum membolehkan suami memberikan teguran, bahkan dalam beberapa konteks sanksi fisik yang dibatasi, sebagai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga dan memulihkan ketaatan istri.⁴⁶

Namun, hal ini dikontrol dengan ketat dan bukan berarti suami memiliki kebebasan absolut. Nabi Muhammad SAW menekankan perlakuan yang lembut dan penuh kasih sayang terhadap istri.⁴⁷

Secara keseluruhan, fiqh klasik memberikan kerangka hukum yang mengatur posisi dan peran suami-istri secara sistematis dengan menekankan kewajiban dan hak yang saling melengkapi. Suami dipandang sebagai kepala keluarga yang memikul tanggung jawab utama, sementara istri menjalankan peran domestik sebagai pendamping yang taat dan pengelola rumah tangga. Namun, relevansi dan aplikasi pandangan ini terus berkembang sesuai dinamika sosial dan penafsiran ulang dalam konteks modern.

- f. Tinjauan terhadap Norma Ketaatan Istri (Nushūz) dan Hak Memukul Istri (Daraba)

Dalam kajian hukum keluarga Islam, dua konsep yang kerap menjadi perhatian dan perdebatan adalah *nushūz* (ketaatan istri) dan *daraba* (memukul istri). Keduanya berkaitan dengan dinamika hubungan suami-istri dan bagaimana syariat Islam mengatur norma-norma dalam rumah tangga, khususnya mengenai konflik dan penyelesaiannya.

⁴² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī*...682.

⁴³ *Ibid.*, 685.

⁴⁴ Al-Nawawi, *Al-Majmū' Sharh al-Muhadzdzab*, Juz VIII (Kairo: Dār al-Hadith, 1992), 312.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī*...690.

⁴⁶ Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, Juz V (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 240.

⁴⁷ HR. Muslim, *Sahih Muslim*, Kitāb al-Riqāq, No. 1467.

Konsep ini penting untuk dipahami dalam konteks sejarah, teks suci, dan perkembangan pemikiran fiqh kontemporer.

1) Pengertian Nushūz

Secara bahasa, *nushūz* berarti “membangkang” atau “melawan”. Dalam konteks rumah tangga Islam, *nushūz* merujuk pada ketidaktaatan istri terhadap suami dalam perkara yang ma’ruf (baik dan sesuai syariat). Definisi ini dipertegas oleh para ulama klasik yang menekankan bahwa *nushūz* adalah pelanggaran istri terhadap kewajibannya dalam rumah tangga, seperti menolak bergaul secara baik, meninggalkan rumah tanpa izin, atau berperilaku yang merusak keharmonisan.⁴⁸

Menurut QS. An-Nisā’: 34, ayat ini secara eksplisit menyinggung perlunya penanganan terhadap *nushūz* sebagai upaya menjaga kestabilan rumah tangga:

“Wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, (jika tidak berhasil) tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan (jika masih tidak berhasil) pukullah mereka...”⁴⁹

2) Norma Ketaatan Istri dalam Perspektif Islam Klasik

Norma ketaatan istri (*ta’ah*) dalam Islam memiliki batasan yang tegas, yaitu ketaatan dalam hal-hal yang ma’ruf dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Para ulama seperti Imam al-Nawawi dan Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa istri wajib taat selama tidak diperintah untuk bermaksiat kepada Allah.⁵⁰ Oleh karena itu, ketaatan bukanlah ketaatan buta, melainkan ketaatan yang sesuai prinsip syariah dan nilai-nilai keadilan.

3) Hak Memukul Istri (Daraba): Interpretasi dan Kontroversi

Ayat dalam QS. An-Nisā’: 34 sering menjadi titik kontroversi karena penggunaan kata *daraba* yang secara bahasa berarti “memukul”. Namun, para mufassir dan ulama fiqh klasik memiliki berbagai penafsiran terhadap makna *daraba* ini.

a) Penafsiran Harfiah

Sebagian ulama fiqh klasik, seperti Imam Ahmad dan Ibnu Qudamah, memandang *daraba* sebagai pukulan simbolis yang tidak menyakitkan dan tidak meninggalkan bekas, sebagai langkah terakhir dalam penanganan *nushūz* setelah usaha nasihat dan pisah ranjang.⁵¹

b) Penafsiran Simbolis

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*...695.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan...*

⁵⁰ Al-Nawawi, *Al-Majmū’ Sharh*... 330.

⁵¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*...134.

Sebagian mufassir kontemporer dan ulama modern mengartikan *daraba* secara lebih simbolis, yakni sebagai bentuk peringatan tanpa kekerasan fisik. Mereka menekankan pentingnya menghindari tindakan yang merendahkan dan menyakitkan secara fisik, sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan kasih sayang dan perlakuan adil.⁵²

c) Larangan Kekerasan

Dalam banyak fatwa dan kajian modern, kekerasan terhadap istri ditegah keras. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang menyakiti istri dan menegaskan bahwa suami terbaik adalah yang paling baik kepada istrinya.⁵³

4) Prosedur Penanganan Nushūz Menurut Fiqh Klasik

Secara urut, penanganan *nushūz* dilakukan dengan tahapan:

- a) Memberikan nasihat dan peringatan secara lisan.
- b) Memisahkan tempat tidur sebagai bentuk teguran dan refleksi.
- c) Jika kedua cara itu tidak berhasil, barulah *daraba* dalam pengertian yang sangat terbatas dan simbolis.⁵⁴ Langkah ini bertujuan agar istri kembali ke ketaatan dan harmoni rumah tangga tetap terjaga.

g. Implikasi Fiqh Klasik terhadap Ketimpangan Peran Gender dalam Keluarga

Fiqh klasik merupakan hasil ijtihad ulama yang dikembangkan dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah tertentu. Dalam ranah hukum keluarga Islam, fiqh klasik memberikan panduan yang jelas mengenai peran dan posisi suami-istri, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sejumlah ketentuan tersebut berdampak pada ketimpangan peran gender di dalam keluarga. Pemahaman dan penerapan fiqh klasik secara literal tanpa mempertimbangkan dinamika zaman modern berpotensi memperkuat stereotip dan ketidaksetaraan gender yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan Islam yang hakiki.

1) Dasar Ketimpangan dalam Fiqh Klasik

Secara tradisional, fiqh klasik menempatkan suami sebagai kepala keluarga (*qiwāmah*) dengan tanggung jawab dan kewenangan dominan, sementara istri diposisikan sebagai pengelola domestik yang harus taat kepada suami. Posisi ini mencerminkan struktur patriarki yang umum pada masa lalu, di

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*... 450.

⁵³ HR. al-Tirmidzi, No. 3895.

⁵⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*... 700.

mana laki-laki memiliki akses dan kontrol lebih besar dalam ranah publik maupun privat.⁵⁵

Hak dan kewajiban yang berbeda antara suami dan istri seperti kewajiban nafkah bagi suami dan ketaatan bagi istri seringkali diinterpretasikan secara kaku sehingga menimbulkan ketimpangan peran. Misalnya, kewajiban istri untuk taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat sering dipahami sebagai kewajiban mutlak, sementara kewajiban suami untuk menafkahi tidak selalu diimbangi dengan tanggung jawab emosional dan pengasuhan yang setara.⁵⁶

2) Implikasi Praktis Terhadap Peran Gender

a) Dominasi Suami dalam Pengambilan Keputusan

Fiqh klasik memberi suami hak kepemimpinan dalam rumah tangga yang meliputi pengaturan keuangan, pendidikan anak, hingga keputusan sosial. Hal ini berimplikasi pada kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan strategis keluarga, yang secara sosial berkontribusi pada marginalisasi suara perempuan.⁵⁷

b) Pembatasan Ruang Gerak dan Aktivitas Istri

Dalam banyak kitab fiqh, ruang gerak istri dibatasi oleh aturan ketaatan dan larangan keluar rumah tanpa izin suami kecuali untuk keperluan penting. Norma ini memengaruhi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial, yang menjadi faktor ketimpangan gender yang sistemik.⁵⁸

c) Pembeneran Kekerasan dalam Bingkai Pengendalian

Ketentuan fiqh klasik mengenai *nushūz* dan *daraba* dalam QS. An-Nisā': 34 sering disalahpahami dan disalahgunakan sebagai pembeneran kekerasan terhadap istri. Meskipun sebenarnya pembatasan hukumnya ketat dan sarat kondisi, penerapan yang keliru menimbulkan dampak negatif terhadap hak-hak perempuan dan keadilan dalam rumah tangga.⁵⁹

3) Perspektif Modern terhadap Ketimpangan Gender

Seiring perkembangan ilmu sosial dan kajian gender, pendekatan fiqh klasik mulai direvisi dengan mempertimbangkan konteks sosial kontemporer dan hak asasi manusia. Para ulama dan

⁵⁵ *Ibid.*, 680.

⁵⁶ Al-Nawawi, *Al-Majmū' Sharh...* 300.

⁵⁷ Fatimah Mernissi, *The Forgotten Queens of Islam* (Austin: University of Texas Press, 1993), 75

⁵⁸ Amina Wadud, *Qur'an and Woman...* 110.

⁵⁹ L. Ali, *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence* (New York: Oneworld Publications, 2006), 98.

intelektual Islam kini lebih menekankan bahwa prinsip keadilan (*'adl*) dan kasih sayang (*rahmah*) harus menjadi landasan utama dalam relasi suami-istri.⁶⁰

Pengembangan tafsir modern menolak interpretasi literal yang mengekang peran perempuan dan menegaskan pentingnya pembagian peran yang seimbang, di mana perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam pengambilan keputusan dan aktivitas sosial tanpa kehilangan kodratnya sebagai istri dan ibu.⁶¹ Fiqh klasik telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk hukum keluarga Islam, namun ketentuan-ketentuannya yang bersifat patriarkal dan hierarkis turut berkontribusi terhadap ketimpangan peran gender dalam keluarga. Pemahaman dan penerapan fiqh perlu dikontekstualisasikan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam, agar nilai-nilai universal Islam tentang penghormatan dan kemuliaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dapat terwujud dalam kehidupan keluarga yang harmonis dan adil.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan gender dalam hukum keluarga Islam merupakan konsep yang berakar kuat pada prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *rahmah* (kasih sayang), yang tercermin dalam ajaran Al-Qur'an dan hadis. Konsep *qiwamah*—kepemimpinan suami dalam keluarga—menjadi fondasi utama dalam relasi suami istri, namun pemaknaan dan penerapannya mengalami perkembangan signifikan antara tafsir klasik dan modern. Tafsir klasik cenderung menegaskan peran dominan suami sebagai kepala keluarga dan peran domestik istri yang lebih terbatas, sementara tafsir modern menginterpretasikan *qiwamah* secara lebih inklusif, menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar yang berkontribusi aktif dalam pengambilan keputusan keluarga. Hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam dirancang untuk saling melengkapi, dengan suami bertanggung jawab dalam hal nafkah dan perlindungan, serta istri menjalankan fungsi domestik dan mendukung harmonisasi rumah tangga. Namun, dalam fiqh klasik, relasi tersebut sering kali menimbulkan ketimpangan gender karena dominasi suami dalam pengambilan keputusan dan penegakan norma ketaatan istri. Pandangan ulama fiqh klasik memperkuat posisi hierarkis suami-istri yang pada praktiknya mengarah pada pembatasan ruang gerak dan partisipasi perempuan dalam ranah publik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang dan mengontekstualisasikan ajaran fiqh tersebut dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang esensial dalam Islam,

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*... 460.

⁶¹ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oxford: Oneworld, 2001), 150.

agar relasi suami istri tidak hanya harmonis secara formal, tetapi juga berkeadilan dan saling menghormati.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fadl, Khaled. 2001. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld,
- Ali, L. 2006. *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence*. New York: Oneworld Publications,
- Al-Ghazali. t.t. *Ihya' Ulumuddin*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr,
- Al-Kasani. 1997. *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, Juz V. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah,
- Al-Nawawi. 1992. *Al-Majmū' Sharh al-Muhadzdzab*, Juz VIII. Kairo: Dār al-Hadith,
- Al-Ṭabarī. 2001. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz V. Beirut: Dār al-Ma'rifah,
- Creswell, John W. 2013. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications,
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,
- Engineer, Asghar Ali. 2004. *The Rights of Women in Islam*. New Delhi: Sterling Publishers,
- Fakih, Mansour. 2006. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Ibn Manzur. 1990. *Lisān al-'Arab*, Jilid 11. Beirut: Dar al-Fikr,
- Ibnu Qudamah. 2000. *Al-Mughni*, Juz IV. Beirut: Dār al-Fikr,
- Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991.
- Mernissi, Fatimah. 1993. *The Forgotten Queens of Islam*. Austin: University of Texas Press,
- Mulia, Musdah. 2019. *Ensiklopedi Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*. Jakarta: Kalyanamitra,
- .2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Kata Kita,
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati,
- . 1998. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan,

UNESCO. *Gender Equality and Equity: A Summary Review of UNESCO's Accomplishments since the Fourth World Conference on Women (Beijing 1995)*. Paris: UNESCO,

Wadud, Amina. 2000. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.

Wahbah al-Zuhaylī. 1989. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII. Damaskus: Dār al-Fikr,

HR. al-Bukhari, *Adab al-Mufrad*, no. 538.

HR. Muslim, *Sahih Muslim*, Kitāb al-Riqāq, no. 1467.

HR. Ahmad, *Musnad Ahmad*, no. 24677; juga dalam al-Tirmidzi, no. 1162.

HR. al-Tirmidzi, *Kitāb al-Raḍā'*, no. 3895.

HR. Tirmidzi, no. 3895.